

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman. Keberagaman di Indonesia ini nyatanya disebabkan karena ribuan pulau yang terbentang dari ujung Sabang sampai ujung Merauke Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, tercatat bahwa jumlah pulau yang dimiliki Indonesia mencapai 17.001 pulau. Lalu, sebanyak 16.000 diantaranya sudah memiliki nama (Finaka.W Andrian et al., 2023). Dengan lebih dari 17.000 pulau tersebut, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling beragam secara kultural di dunia yang mencakup keberagaman dalam bahasa, adat istiadat, agama, dan tradisi-tradisi unik yang telah berkembang selama ribuan tahun.

Dari keberagaman yang ada tersebut Indonesia menjadi negara yang memiliki multikulturalisme yang sangat besar di dunia dengan keadaan yang terdiri dari berbagai keyakinan suku, agama, ras, budaya, bahasa, dan kelas sosial (Liata & Fazal, 2021). Menjadi multikultural berarti memandang adanya perbedaan tersebut menjadi milik bersama yang bersifat universal dan penting, serta secara diam-diam mengakui bahwa semua budaya adalah setara. Jika keberagaman dilestarikan dan cita-cita keberagaman yang bertanggung jawab diterapkan untuk memupuk integritas dan persatuan,

maka hal tersebut akan membawa manfaat bagi bangsa dan negara Indonesia (Munif, 2018).

Dari keberagaman tersebut timbul suatu fenomena multikulturalisme yang dimana saat ini sedang menghadapi berbagai konflik. Potensi konflik yang bisa muncul dari keadaan ini bisa terjadi dari kurangnya komunikasi dan tidak tersosialisasikannya perbedaan seperti suku, agama, etnis, dan ras. Hal tersebut dapat memicu perpecahan apabila tidak dihadapi dengan benar (Sudargini & Purwanto, 2020).

Menurut William A. Galston (2007), untuk mengatasi konflik multikulturalisme adalah dengan memiliki *civic virtue* (kebajikan kewarganegaraan) untuk warga negaranya. Adanya *civic virtue* membuat warga terbantu dengan bentuk tatanan hidup yang berdasarkan kebersamaan demi terciptanya keharmonisan dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Eli, 2022).

Kebajikan warga negara (*civic virtue*) sangat penting bagi eksistensi bangsa dan negara karena kebajikan tersebut mewujudkan cita-cita seperti keadilan dan tanggung jawab yang mengubah seseorang menjadi warga negara yang baik dan berpengetahuan. Inisiatif pemahaman multikultural melalui pendidikan adalah salah satu cara untuk mencoba mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dari multikulturalisme. Melalui pendidikan multikultural, peserta didik akan memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang mengakui dan menghormati keberagaman budaya. Peserta didik yang

memiliki pemahaman multikulturalisme mungkin lebih cenderung berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan (Suharsono, 2018).

Pendidikan Multikultural pada dasarnya berupa bentuk perwujudan untuk mendapatkan sikap toleransi, pemahaman, kesadaran dan pengetahuan yang mempertimbangkan perbedaan kultural, dan juga perbedaan dan persamaan antar budaya dan kaitannya dengan pandangan dunia, konsep, nilai, keyakinan, dan sikap (Aly, 2021). Sesuai dengan gagasan dari James Banks tentang pendidikan multikultural.

Pendidikan Multikultural merupakan sebuah bentuk pemikiran yang merangkai adanya kepercayaan (*set of believe*) dan pengakuan akan pentingnya penilaian adanya keragaman dalam budaya dan etnis sehingga tercapainya pengalaman sosial, gaya hidup, dan kesempatan pendidikan untuk individu, kelompok, maupun negara (Sipuan et al., 2022).

Berdasarkan penelitian Fatimah Trisna Septiani (2020) membuktikan adanya hubungan antara pemahaman nilai-nilai multikultural terhadap sikap integrasi nasional. Hal tersebut sudah di uji dan mendapatkan hasil bahwa antara pemahaman peserta didik memiliki hubungan positif yang signifikan serta memiliki kontribusi terhadap sikap integrasi peserta didik.

Selain itu, penelitian Dewi Sartika, Nasehudin, & Suniti (2020) menunjukkan penerapan pendidikan multikultural memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sikap dan toleransi peserta didik. Pendidikan multikultural diharapkan dapat mengajarkan kepada peserta didik mengenai nilai-nilai menghargai keberagaman, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, dan menghindari konflik sebagai solusi atas suatu permasalahan.

Seluruh masyarakat Indonesia harus mendapat pendidikan multikultural secara nasional dan komprehensif. Pendidikan ini harus diimbangi dengan pengembangan budaya masyarakat multikultural Indonesia yang harus berpusat pada kebajikan warga negara (*civic virtue*). Kewarganegaraan atau keadaban harus ditanamkan dengan cita-cita Pancasila yang meliputi semangat masyarakat multikultural, kesetaraan, kepercayaan, toleransi, hidup gotong royong, solidaritas, dan partisipasi aktif warga negara (Lara Sati, 2021).

Merujuk data BPS pada pertengahan tahun 2023, Indonesia memiliki penduduk sebanyak 278,69 juta jiwa dengan penganut agama yang beragam. Agama yang paling banyak dianut di Indonesia adalah Islam sebanyak 87,02 persen; 7,43 persen beragam Kristen; 3,06 persen beragama Katolik; 1,69 persen beragama Hindu; 0,73 persen beragama Buddha; 0,03 persen beragama Konghucu; dan 0,04 persen penduduk Indonesia yang menganut aliran kepercayaan.

Dari data di atas, dapat dilihat pula kondisi sekolah-sekolah di Indonesia yang dapat dikatakan sebagai lingkungan yang multikultur. Terlebih pada sekolah-sekolah negeri yang dimana di dalamnya terdiri dari para peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda-beda. Mulai dari keragaman suku, agama, etnis, budaya, ras, hingga Bahasa. Hal tersebut menjadi ciri bahwa di lingkungan sekolah pun sudah sangat menggambarkan bagaimana majemuknya bangsa Indonesia.

Dengan adanya keberagaman di sekolah-sekolah Indonesia tersebut, khususnya di SMP Negeri 62 Jakarta, dilakukan penelitian untuk mengkaji pemahaman multikultural dengan *civic virtue* peserta didik di Sekolah Menengah Pertama yang dituangkan ke dalam judul “Hubungan Pemahaman Multikultural Dengan *Civic Virtue* Peserta Didik”.

### **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah yang muncul pada penjabaran latar belakang di atas dirumuskan sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman mengenai keadaban kewarganegaraan (*civic virtue*) peserta didik kelas VIII SMPN 62 Jakarta.
2. *Civic virtue* peserta didik masih rendah pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMPN 62 Jakarta.
3. Masih terdapat penyimpangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan pada identifikasi masalah tersebut, diberikan batasan dalam penelitian ini. Pembatasan dalam penelitian ini ialah pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan khususnya mengenai pemahaman multikultural. Sehingga, penelitian ini untuk melihat hubungan pemahaman multikultural dengan *civic virtue* peserta didik.

#### D. Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang disusun berdasarkan pembatasan masalah dan identifikasi masalah yaitu, “Apakah terdapat hubungan antara pemahaman multikultural dengan *civic virtue* peserta didik?”

#### E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam hal teori, informasi, serta pemahaman tentang hubungan pendidikan multikultural dengan *civic virtue* peserta didik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi secara praktis pada beberapa pihak, yaitu:

- a. Peserta Didik

Bagi peserta didik, penelitian ini diharapkan dapat lebih meningkatkan *civic virtue* melalui pemahaman multikultural untuk menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dengan menanamkan sikap empati, *respect*, apresiasi, dan empati terhadap kepluraritasan bangsa Indonesia.

b. Guru

Bagi guru, penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu referensi pendekatan pembelajaran bahwa pemahaman multikultural melalui pendidikan multikultural dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan *civic virtue* peserta didik.

c. Sekolah

Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu acuan dalam membuat kebijakan atau kegiatan pembiasaan.

